Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau

**(Kajian Etnografi tentang Komunikasi Antar Budaya dalam Sistem Pemerintahan pada
Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam)**

Rusyda Fauzana

Abstract

Decentralization which is defined as the authority to manage the governance and people interest in a region by themselves based on the law, has similarity with the system of Nagari by Minangkabaunese people in governing their region. Based on this, there is an integration of cultures and the same perception between two systems in perceiving the meaning of decentralization. This research uses qualitative approach with Ethnography as the research design to dig how minangkabauneses implement their cultural values. This research uses symbolic interactionism by Herbert Blumer in analysing research data. The result of the research showed that Nagari and decentralisation which is known as region autonomy have similarity in concept which helping people in perceiving and implementing cultural and national principals.

Keywords: Meaning, Nagari, Decentralization, Regional Autonomy, Symbolic Interactionism

Pendahuluan

Pasca reformasi, wacana konsep desentralisasi mulai marak diperbincangkan kembali. Namun UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah ini masih menjadi perdebatan karena ternyata masih belum mengatur pelaksanaan desentralisasi menuju terciptanya proses partisipasi dan pemberdayaan dalam pemerintahan dan pembangunan. Maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan keluasaan wewenang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri sesuai dengan konsep dan ciri khas masyarakat, serta sesuai dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam otonomi daerah pemerintah memberi peluang seluas-luasnya pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yang dalam bahasa UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dikatakan, “ *Otonomi daerah adalah hak, wewenang,*

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Konsep *nagari* sendiri menurut Mochtar Naim (1990) adalah lambang mikrokosmik dari sebuah tatanan makrokosmik yang lebih luas. Dalam dirinya ada sistem yang memenuhi persyaratan embrional dari sebuah ”negara” dalam artian miniatur, sehingga tak salah jika penulis-penulis asing suka menjuluki sistem tatanan di tingkat *nagari* ini sebagai ”republik-republik kecil” yang sifatnya berdiri sendiri, otonom dan mampu membenahi diri sendiri. Bukan saja bahwa ketiga unsur utama dari perangkat pemerintahan ada di dalam tatanan *nagari*, yakni unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi dia juga merupakan kesatuan holistik bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya lainnya. Ikatan *bernagari* di Minangkabau, dahulunya, bukan saja primordial-konsanguinal (ikatan daerah dan kekerabatan adat) sifatnya tetapi juga struktural-fungsional dalam artian teritorial-pemerintahan yang efektif.

Wacana ”*Babaliak ka Nagari*” sebagai pengejawantahan dari konsep desentralisasi adalah sebuah contoh komunikasi yang terjalin antara budaya lokal dengan sistem pemerintahan modern. Di sini Masyarakat Minang berusaha memaknai konsep pemerintahan yang utuh menurut pemahaman ideologi budaya lokal mereka.

Desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai keinginan dan potensinya masing-masing. Adanya kesamaan pengaturan pemerintahan yang menonjolkan pelimpahan kekuasaan ini membuat hasrat untuk kembali ke pemerintahan *Nagari* menguak di masyarakat. Walaupun memang tak secara menyeluruh penerapannya, dengan melihat struktur dan sistem pemerintahan pada sistem pemerintahan Minangkabau yang dulu berbentuk sistem federal, maka dalam proses penerapan pemerintahan *nagari* sekarang ini mengalami pereduksian pada konsep idealnya yang dulu. Pembentukan identitas sosial yang terjadi pada diri masyarakat pun mengalami penyesuaian dengan keadaan kekinian.

Pengembalian identitas sosial masyarakat Minang yang sudah tergerus oleh beberapa rezim kekuasaan akan menghasilkan identitas sosial yang bersifat fleksibel, sebagaimana yang dikatakan Chris Barker bahwa ”Identitas kultural bukanlah esensi, melainkan posisi yang terus bergeser; dan titik perbedaan yang menjadi dasar pembentukan identitas kultural berjumlah banyak dan terus bertambah.” (Barker, 2005: 221). Dalam artian ini identitas yang dilahirkan akan berbeda dari identitas yang dulu dimiliki. Dalam masyarakat Minangkabau

sedikit banyaknya terjadi karena terjadinya perbauran antar budaya yang telah mewarnai budaya masyarakat Minang sendiri.

Dalam perjalanannya sistem *nagari* sendiri telah mengalami banyak akulturasi dan penyesuaian pada model organisasinya. Realitas ini mengundang banyak kontroversi yang muncul di dalam masyarakat Minang sendiri pada bentuk model apa *nagari* itu akan dikembalikan, apakah model awal sebelum bersentuhan dengan Islam, masa ketika adat dan Islam disandingkan, masa kolonial, Orde Lama ataukah Orde Baru. Pada faktanya sistem *nagari* yang utuh memang sudah mengabur dari pemahaman masyarakat karena tidak ada sumber-sumber otentik dalam penerapannya kecuali di dalam tambo-tambo adat dan itu pun tidak dirinci.

Melihat kontroversi menyikapi kebijakan kembali ke *nagari*, dapat dilihat adanya suatu politik identitas yang ingin dilakukan oleh masyarakat Minang yang ingin meneguhkan identitas sosial mereka sebagai orang Minang yang memiliki akar kesejarahan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Barker bahwa menjadi pribadi (*person*) maka tidak akan lepas dari mengonstruksi identitas diri (*self-identity*) yaitu konsep yang kita pegang perihal diri kita sendiri atau bagaimana kita memandang diri kita serta mengonstruksinya disebut identitas sosial (*social identity*) yaitu membangun harapan dan pendapat orang lain mengenai diri kita (Barker, 2005: 217).

Menurut Barker kita disusun menjadi individu (subjek) melalui proses sosial. Secara umum disebut sosialisasi atau akulturasi. Sumber-sumber yang kita pakai bagi proyek identitas tergantung pada kekuasaan situasional yang menjadi asal kompetensi kultural kita dalam konteks kultural tertentu. Di sini identitas menjadi penting tidak hanya untuk penggambaran diri tetapi juga ciri-ciri sosial. Maka suatu yang wajar ketika isu kembali ke *nagari* menjadi isu yang terus merebak karena sebagian masyarakat Minang ingin membangun identitas sosialnya dan identitas dirinya sebagai orang Minang.

Untuk menggali bagaimana masyarakat Minangkabau memaknai *nagari* sebagai representasi sistem desentralisasi, maka dalam penelitian ini digunakan teori interaksionisme simbolik.

Menurut Deddy Mulyana, interaksionisme simbolik adalah “Kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas

simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial” Secara ringkas interaksi simbolik didasarkan pada premis-premis berikut: 1) Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Respon yang diberikan saat menghadapi situasi tersebut tidak bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Respon mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi individu adalah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. 2) Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. 3) Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. (Mulyana, 2008: 71).

Keunikan dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial, penafsiran yang tepat atas simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungan, sebaliknya, penafsiran yang keliru atas simbol dapat menjadi petaka bagi hidup manusia dan lingkungannya. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 2008: 68).

Interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Interaksi simbolik ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra mitra interaksi mereka. Keunikan dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial. (Heliemah dan Kertamukti dalam Jurnal ASPIKOM: 2017)

Menurut Haliemah dan Kertamukti dalam Jurnal ASPIKOM, teori interaksi simbolik mengajarkan bahwa makna muncul sebagai hasil interaksi di antara manusia baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui aksi dan respons yang terjadi, kita memberikan makna ke dalam kata-kata atau tindakan, dan karenanya kita dapat memahami suatu peristiwa dengan cara-cara tertentu (Morissan, 2013: 110).

Berdasarkan ulasan Dadi Ahmadi dalam jurnal Interaksionisme: Sebuah Pengantar (2005), dalam perspektif Blumer, teori interaksi simbolik mengandung beberapa ide dasar, yaitu:

- (1) Masyarakat terdiri atas manusia yang bertinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial;
- (2) Interaksi terdiri atas berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi nonsimbolis mencakup stimulus respons, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan;
- (3) Objek-objek tidak memiliki makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak;
- (4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal. Mereka juga melihat dirinya sebagai objek;
- (5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretasi yang dibuat manusia itu sendiri;
- (6) Tindakan tersebut saling berkaitan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Ini merupakan “tindakan bersama”. Sebagian besar “tindakan bersama” tersebut dilakukan berulang-ulang, namun dalam kondisi yang stabil. Kemudian di saat lain ia melahirkan kebudayaan. (Bachtiar, 2006:249-250).

Tiga premis Blumer tentang interaksionisme simbolik yaitu: (1) manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) maknamakna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. (Umiarso dan Elbadiansyah: 2014: 158)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan konsep kealamiah (kecermatan, kelengkapan, atau orisinalitas) data, yakni kesesuaian antara apa yang mereka rekam sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas

(yang secara matematis dapat diukur) meskipun tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi atau persentase untuk melengkapi analisis datanya (Mulyana: 2013)

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa warga kecamatan Canduang di Kabupaten Agam. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini diambil berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu informan dipilih sesuai spesifikasinya dalam memahami tema penelitian yang peneliti lakukan serta dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian. Informan yang dituju oleh peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau dari golongan intelektual seperti mahasiswa, dari golongan pegawai negeri sipil dan masyarakat awam yang memiliki latar belakang pemahaman tentang tema yang bersangkutan, serta perangkat struktural dalam nagari di daerah tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah interaksi simbolik masyarakat dalam memaknai nagari sebagai representasi sistem desentralisasi di kecamatan Canduang, kabupaten Agam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Miles dan Huberman (1992: 16) bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk membandingkan atau melakukan *cross-checking* pada konsistensi informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda dalam lingkup metode kualitatif, menerapkan model *triangulation of qualitative data sources*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *Nagari* belum terhapus dari pemikiran masyarakat Minangkabau karena dia telah ada sejak abad ke 15 dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakatnya dalam lingkungan mereka. Bisa juga dikatakan bahwa sistem ini belum mampu digantikan oleh sistem negara bangsa yang terbentuk pasca penjajahan. Dalam penelitian ini diperlihatkan bagaimana pandangan masyarakat Minangkabau tentang *Nagari* sebagai simbol politik mereka secara tidak langsung yang dapat ditangkap dari pemaknaan mereka terhadap *nagari*.

Pada konteks sistem pemerintahan, informan memaknai *nagari* sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dari Kerajaan Minangkabau yang memiliki otonomi mutlak. *Nagari* dimaknai juga sebagai sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh wali *nagari* yang didampingi oleh lembaga *nagari* Badan Permusyawaratan *Nagari* berdasarkan Peraturan

Daerah No.12 Tahun 2007, di samping ada lembaga lain yang memiliki kekuasaan tertinggi yang disebut Kerapatan Adat *Nagari*.

Informan lainnya memahami *nagari* sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada adat yang berpedoman pada ajaran Islam. Ada juga yang menyebutkna bahwa *nagari* adalah penggabungan sistem birokrasi dengan budaya Minangkabau. *Nagari* sebuah pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat guna terciptanya masyarakat yang tertib. Ada juga pendapat informan yang mengatakan *nagari* adalah salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia selain bentuk pemerintahan desa di Jawa. Bahkan seorang informan memaknai bahwa *nagari* adalah mirip dengan negara melihat asal kata *nagari* yang ada hubungannya dengan kata negara. Namun ada juga informan yang berpendapat bahwa *nagari* adalah pemerintahan setingkat desa dan gabungan dari beberapa desa.

Sebagian besar informan memiliki kecenderungan memaknai *nagari* sebagai sebuah kesatuan sistem secara konseptual seperti yang dimaknai oleh seroang informan bahwa *nagari* adalah suatu wilayah yang menerapkan pemerintahan Minangkabau. *Nagari* juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang spesifik (adat salingka *nagari*). Informan lain memaknai *nagari* sebagai sistem pemerintahan yang terendah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2007, seorang informan memaknainya sebagai suatu wilayah administrasi pemerintahan yang terbawah dalam sistem pemerintahan di Sumatera Barat. Tanggapan lain mengenai *nagari* adalah sebagai suatu kawasan adat yang menjunjung tinggi norma adat di suatu wilayah *nagari*.

Nagari dimaknai sebagai ciri khas Minangkabau karena bentuk pemerintahan *nagari* ini hanya terdapat di Minangkabau, dan tidak dimiliki oleh daerah lain di luar Sumatera Barat. Cakupan pemerintahan *nagari* ini adalah seluruh Minangkabau menurut seorang informan. Sementara itu ada informan lain yang memaknai *nagari* sebagai identitas Sumatera Barat.

Sedangkan jika dikaitkan dengan otonomi daerah, *nagari* dimaknai sebagai pemerintahan yang baru dihidupkan kembali setelah ada UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Maka pengelolaan pemerintahan *nagari* harus dilakukan secara mandiri berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya sendiri, tidak ada intervensi dari pihak lain karena pemerintahan *nagari* tidak hanya mengelola masalah pemerintahan saja tapi juga agama, sosial, politik dan sebagainya, namun tetap terikat dengan pemerintahan pusat.

Dalam konteks lingkup wilayah, informan memaknai *nagari* sebagai pemerintahan yang terdiri dari dua atau lebih wilayah jorong yang dikepalai oleh seorang kepala jorong. Bagian dari suatu *nagari* sekarang adalah gabungan dari desa-desa dari pemerintahan terdahulu yang sekarang disebut jorong. Jorong adalah bagian dari *nagari* yang hanya ada di wilayah kabupaten. Bahkan ada informan yang memaknai jorong sebagai sebuah dusun yang di dalamnya terdapat beberapa *kaum* (kelompok masyarakat berdasarkan suku). Maka jorong bertanggung jawab terhadap masyarakat karena jorong adalah bagian dari *nagari*. Sedangkan *nagari* disetarakan dengan desa dimaknai informan karena *naagri* adalah sistem pemerintahan setingkat desa dengan penggabungan sistem birokrasi dengan budaya Minangkabau. Informan lainnya memahami *nagari* setara dengan desa karena *nagari* identik dengan desa yaitu ada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota.

Dari data di atas, hal yang dominan muncul dalam pemikiran mereka tentang *nagari* adalah “sebuah sistem pemerintahan”. Sebuah sistem yang mengatur kehidupan mereka bermasyarakat, yang tidak hanya mencakup masalah di wilayah publik namun juga masalah di wilayah privat. Hal ini karena sistem pemerintahan Minangkabau diterapkan dalam lingkup ranah yang kecil yaitu antara orang-orang yang memiliki kekerabatan dekat dari nenek moyang mereka. Dengan sistem kekerabatan ini pula diatur kehidupan sosial mereka seperti munculnya istilah anak-kemenakan dan mamak-kemenakan merupakan nilai-nilai yang dihasilkan dari sistem ini. Bahkan dalam masalah pengangkatan pemimpin atau pembagian kekuasaan pun tidak jauh-jauh dari bagaimana mereka bersepakat antar beberapa keluarga inti (*jurai*) dalam mengajukan orang yang mereka pilih berdasarkan kepada: terstruktur melalui keturunan garis ibu, atau paling tidak menurut model itu (Benda-Beckmann, 2000). Masih dalam pembagian kekuasaan, pada buah gadang⁴ kepemimpinan buah gadang berada di tangan penghulu. Kepenghuluan merupakan *sako* kelompok, yang turun dari generasi ke generasi. Akan tetapi, penghulu adalah juga pemimpin kelompok di dalam *nagari*. Jadi, jika seseorang penghulu hendak diangkat, ada dua perangkat aturan yang harus diikuti. Perangkat pertama, merujuk pada pemilihan calon penghulu oleh orang-orang yang memiliki kepanghuluan. Perangkat kedua merujuk pada aturan-aturan yang membuat komunitas politik *nagari* menerima seorang penghulu baru sebagai salah seorang pemimpin mereka. Menurut prinsip-prinsip pusako, penunjukan penghulu merupakan urusan kelompok yang memegang sako sebagai properti warisan (*pusako*). Tidak ada penghulu yang dapat diangkat tanpa keputusan bulat kelompok, tanpa suatu kebulatan kaum/buah gadang. Dan gelar ini diturunkan dari mamak (paman) ke kamanakan.

Dari penjelasan di atas, maka terlihat bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau benar-benar sangat dilingkupi oleh sistem aturan yang datang dari urusan rumah tangga mereka sendiri. Suatu hal yang menyangkut kepentingan sebuah kaum (kumpulan keluarga satu keturunan). Maka wajar jika ide negara yang mengejawantah pada *nagari* begitu lekat dalam benak mereka.

Sistem *nagari* bukanlah model kekuasaan otoriter di mana kekuasaan berpusat pada satu penguasa saja, tapi model sistem *nagari* adalah model pemerintahan yang begitu kuat dalam menjunjung musyawarah dan mufakat. Semua keputusan tidak diambil berdasarkan keinginan sepihak semata tapi memikirkan pembagian kesejahteraan bersama.

Satu hal penting kenapa *nagari* tetap dipertahankan merujuk pada Perda No. 13 tahun 1983 adalah karena *Nagari* di Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di daerah Sumatera Barat, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional. Keberadaan *nagari* inilah yang meneguhkan identitas Minangkabau sehingga mereka merasa inilah identitas yang telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan mereka dari dulu sebelum dibentuknya NKRI hingga masa sekarang.

Terkait dengan masalah identitas, sebagaimana yang dikatakan oleh Reicher di dalam Markova (2007) bahwa "*social identity theory aims to explain how individuals define themselves with respect to cultural contents, relations with others, and pursuing the group's goals.*" Apa yang tertera dalam Undang-undang di atas yang dibuat oleh pemerintah daerah Sumatera Barat melalui musyawarah dengan masyarakat mereka adalah bentuk bagaimana masyarakat Minangkabau mendefinisikan diri mereka berdasarkan konten budaya dan tatanan hubungan internal kelompok (*outgroups*) dan hubungan dengan kelompok luar (*outgroups*) yaitu dengan pemerintah pusat, dan pertimbangan terhadap tujuan-tujuan kelompok, yang akhirnya membentuk identitas sosial masyarakat Minang itu sendiri.

Markova (2007) mengatakan, dalam identitas sosial membahas bagaimana anggota-anggota kelompok membandingkan diri mereka dengan kelompok di luarnya, bagaimana mereka memahami hubungan kelompok di luar mereka dan kelompok mereka sendiri, dan apakah

mereka merasa memiliki kekuatan melawan kelompok di luarnya. Dalam konteks identitas masyarakat Minangkabau, mereka melakukan sebuah kompromi dengan kelompok di luarnya yaitu negara karena mereka tak memiliki kekuatan lebih untuk melawan, sebenarnya itu pernah terjadi pada masa PRRI namun mereka kalah. Sehingga kekalahan ini membuat masyarakat Minangkabau memilih untuk berkompromi untuk menghindari sejarah masa lalu yang kelam tersebut. Seperti halnya teori representasi sosial, identitas sosial menurut Reicher menekankan pada dinamika, perubahan, dan isi dari kategori sosial dan pada peran budaya dan sejarah dalam mengonstruksi kategori sosial (2007). Dari perjalanan sejarah ini masyarakat Minangkabau mengonstruksi identitas mereka yang diperbaharui dengan bentuk kompromi dengan pemerintah pusat, namun tetap mempertahankan identitas inti yang tak dapat diganggu gugat berupa pemerintahan *nagari* yang menjadi ciri kelompok mereka, dan bentuk kekuatan pengikat kelompok mereka. Artinya ada sebuah pola interaksi untuk menerjemahkan dan menafsirkan simbol atau makna di luar kelompok masyarakat Minang, yang kemudian simbol dan makna itu disesuaikan dengan simbol mereka yaitu nagari.

Nagari sebagai representasi sosial tentang otonomi daerah dalam sistem desentralisasi merupakan sebuah pembentukan Representasi Emansipasi, yaitu keluaran dari pengetahuan dan ide-ide yang menjadi milik kelompok yang saling berhubungan. Maksudnya adalah ikatan ide-ide yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat Minangkabau dari masa lalu mereka hingga sekarang, yang selalu dipertukarkan satu sama lain dari masa ke masa membuat nagari tetap terjaga hingga sekarang.

Herbert Blumer dalam Umiarso dan Elbadiansyah (2014) mengemukakan interaksionisme simbolik sebagai suatu perspektif bertumpu pada premis yang masing-masing membentuk anatomi teoritik tersendiri dan terintegral dalam satu kajian. Masing-masing premis tersebut adalah:

Premis 1: manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu pada diri mereka.

Dalam kajian bagaimana masyarakat Minangkabau memaknai sistem pemerintahan negara Indonesia diawali dari bagaimana mereka memandang sistem pemerintahan adat yang lebih dahulu membangun masyarakatnya. Konsep nagari menjadi landasan dalam memandang sebuah sistem pemerintahan atau menjadi pijakan sebagai standar pengaturan kehidupan mereka.

Premis 2: makna berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.

Saat sistem desentralisasi ditawarkan untuk pengaturan daerah, hal ini diidentifikasi sebagai sesuatu yang sudah ada melekat dalam pikiran masyarakat Minangkabau. Ide ini diinteraksikan dan disesuaikan agar dapat diterima sebagai landasan yang sama dalam aturan perundang-undangan agar tercipta harmonisasi di masyarakat, terutama bagi masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem pemerintahan yang khas.

Premis 3: makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses sosial sedang berlangsung.

Masyarakat Minangkabau menerjemahkan dan menafsirkan sistem pemerintahan desentralisasi dalam otonomi daerah sebagai bentuk makna yang sejalan dengan konsep nagari, walaupun ada beberapa ketidaksesuaian, mereka mencoba menggabungkan dua hal tersebut agar bisa mewadahi pikiran mereka dan pikiran negara. Ada proses komunikasi dalam memaknai simbol yang terus-menerus dilakukan agar terjadi kesesuaian dalam penerapannya di masyarakat.

Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau adalah sebuah kelompok budaya yang dalam interaksinya mengalami penyatuan konsep pemerintahan dengan sistem negara Indonesia. Dalam proses ini terjadi komunikasi dua arah di mana negara memaknai persepsi masyarakat Minang dalam mengatur urusan masyarakatnya, dan masyarakat Minang memaknai prinsip dan simbol-simbol dalam desentralisasi yang mereka sesuaikan dengan prinsip ber-Nagari. Ada proses saling memaknai yang kemudian memunculkan penerimaan terhadap pembauran kedua prinsip hingga masyarakat Minangkabau membuat penafsiran terhadap desentralisasi sebagai sistem yang sejalan dan mampu mewadahi sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, Bandung: Bentang Pustaka.
- Berger, Peter, and Luckmann, Thomas. (1976). *The Social Construction of Reality*, New York: Penguin Books.
- Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. (2000). *Goyahnya Tangga Munuju Mufakat*, Jakarta: Grasindo.

- Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. (2000). *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Jakarta: Grasindo.
- Littlejohn, Stephen W. (2002). *Theories of Human Communication*, London: Wadsworth.
- Martin, Judith N. dan Nakayama, Thomas K. (2004). *Intercultural Communication in Context*. Boston: McGraw Hill.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Marková, Ivana. (2007) *Social Identities and Social Representations: How Are They Related?*
- Naim, Mochtar. (1990). “Nagari versus Desa. Sebuah Kerancuan Struktural” *dalam* Edi Utama (ed). *Nagari, Desa dan Pembangunan di Sumatera Barat, Padang: Genta Budaya..*
- Nordholt, Henk Schulte dkk (ed.). (2007). *Politik Lokal di Indonesia: Identitas-Identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.
- Lembaran Daerah Kapubapaen Agam Tahun 2007. (2007). *Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam*.
- Pedoman Penyusunan Perda Pemerintahan Nagari Pengganti Perda no 31 tahun 2001. (2006). *Perhimpunan Wali Nagari Agam*.
- Umiarso dan Elbadiansyah. (2014). *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Dadi Ahmadi. (2005). *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*, Jurnal Komunikasi Mediator Unisba No.2 Vol.9
 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1115/683>>

Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. (2001). *Recreating the Nagari: Decentralization in West Sumatra*, Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers no.31 <<http://www.eth.mpg.de>> diakses 25 Oktober 2008. 108

Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. (2004) *Struggles over Communal Property Rights and Law in Minangkabau, West Sumatra*, Max Planck Institute for Social Anthropology Working Papers no.64 <<http://www.eth.mpg.de>> diakses 25 Oktober 2008.

Jurnal Otonomi, Demokrasi Lokal, Vol/I, No 3, Mei 2000, Jakarta: Yayasan Pariba.

Yutyunyong, Tranakjit. (2009). *The integration of social exchange theory and social representations theory: A new perspective on residents' perception research*, University of Queensland, Jurnal terbaik pada 18th Tourism and Hospitality Education And Research Conference di Curtin University of Technology, web: <http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/PDF/Integration_of_Social_exchange_Theory.pdf>